

**Judul** : Bergulir Setelah Lengsernya Ade Komarudin  
**Tanggal** : Senin, 23 Januari 2017  
**Surat Kabar** : Koran Tempo  
**Halaman** : 7

## Bergulir Setelah Lengsernya Ade Komarudin

**JAKARTA** — Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan mewarnai pencopotan Ade Komarudin dari kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, akhir November lalu. Hampir bersamaan dengan keputusan Partai Golkar memutuskan menempatkan lagi Setya Novanto sebagai pemimpin Dewan, sejumlah politikus melaporkan Ade ke Mahkamah Kehormatan Dewan dengan tuduhan menunda-nunda rancangan yang telah dibahas Badan Legislasi.

Hasilnya, Ade dinyatakan bersalah. Sanksi Mahkamah Kehormatan itu pula yang memuluskan pelengserannya. Dua pekan setelahnya, pada medio Desember lalu, rapat paripurna pertama yang dipimpin Setya akhirnya menyetujui draf tersebut masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional 2017 sebagai rancangan undang-undang inisiatif DPR.

Kepada *Tempo*, Kamis lalu, Ade membeberkan alasannya. "Saya ingin semua pihak memberikan masukan dulu sebelum dibawa ke paripurna," ujarnya. Ade mengingatkan isi pertemuan dengan rombongan Komisi Nasional pengendalian Tembakau pada pertengahan Juli 2016 yang dipimpin oleh tokoh lingkungan hidup, Emil Salim. Menurut Ade, dalam pertemuan di DPR itu, Emil memaparkan bahaya rokok hingga kritik terhadap DPR. "Pedas sekali, saya sampai malu."

Emil mengatakan, alih-alih melindungi petani tembakau seperti tujuan para pengusung, rancangan itu mengancam generasi muda. "RUU Pertembakauan menggabungkan tembakau sebagai budaya dan nikotin yang bersifat adiktif. Ini membahayakan," kata Emil setelah pertemuan. Walhasil, dalam rapat Badan Musyawarah DPR pada bulan berikutnya, Ade meminta draf yang selesai dibahas di Badan Legislasi DPR pada 27 Juli 2016 itu diendapkan lagi.

Ketua Panitia Kerja RUU Pertembakauan, Firman Soebagyo, mengatakan para pengusul beleid kerap bertanya soal nasib draf tersebut setelah Ade memutuskan menunda pembahasan. Dalam sidang Mahkamah, Firman mengaku bersaksi untuk menjelaskan prosedur pembahasan RUU Pertembakauan.

Kini Ade menyiapkan upaya hukum terhadap putusan Mahkamah Kehormatan. "Secara prosedur dan substansi, putusan tersebut keliru," ucapnya.

● MITRA TARIGAN | ANTON SEPTIAN

